

KOMJEN. POL. DR. BOY RAFLI AMAR. M.H.



2022

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
BULAN JANUARI TAHUN 2022**



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

2022



**Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16810**

☎ (021)1500083

🖨 (021)29339690

🌐 www.bnpt.go.id

🐦 @bnptri

🐦 @sinergisitas_

📍 bnpt republik indonesia

📍 sinergisitascenter

📍 @sinergisitascenter

📍 @bnptri

📺 humas bnpt

📺 bnpt tv



Berintegritas
Nasionalisme
Profesional
Terpuji







Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H.
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada bulan Januari 2022 telah disusun sebagai bentuk penyampaian pertanggung jawaban kepada Bapak Presiden serta para pemangku kepentingan atas mandat yang diamanatkan oleh pemerintah kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Laporan ini memuat kegiatan-kegiatan yang dominan dalam pelaksanaan program penanggulangan terorisme, sesuai dengan tugas dan fungsi BNPT untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam rangka penanggulangan terorisme melalui tiga strategi yaitu: Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi. Sepanjang bulan Januari 2022, kegiatan yang dilaksanakan oleh BNPT berfokus pada upaya pembangunan kesiapsiagaan nasional yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, baik dari institusi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, maupun masyarakat luas.

Pada bulan Januari 2022, Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. menyampaikan arah kebijakan dan program kerja BNPT tahun 2022 dengan konsep *pentahelix* berupa kerjasama dan kolaborasi secara multipihak yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, komunitas, media, hingga pelaku seni. Dalam rangka mengimplementasikan konsep tersebut baik secara internal maupun eksternal, Kepala BNPT menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk berkomitmen melakukan pencegahan terorisme dengan konsep "*Pentahelix*" tersebut. Kemudian, BNPT juga menggelar audiensi bersama Dekan dan Rektor Universitas Pasundan (Unpas) pada Kamis, 13 Januari 2022 dan mengajak seluruh akademisi menjadi aktor yang terlibat dalam melakukan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Dalam lingkup internal, Kepala BNPT dalam Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor BNPT menekankan agar seluruh pegawai BNPT mewujudkan arah kebijakan dengan konsep *pentahelix*. BNPT juga terus berinovasi memaksimalkan perannya dalam penanggulangan terorisme melalui kerja sama BNPT dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingat riset menjadi hal penting dalam menentukan langkah strategis BNPT bersama Kementerian/Lembaga dan masyarakat dalam menghadapi transformasi ancaman terorisme di masa depan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai gambaran informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada bulan Januari 2022 dan acuan dalam pelaksanaan program penanggulangan terorisme pada bulan Februari 2022.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,

Boy Rafli Amar





DAFTAR ISI

	hal
KEGIATAN KEPALA BNPT	
• KEPALA BNPT SAMPAIKAN KONSEP <i>PENTAHELIX</i> SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2022	1
• KEPALA BNPT HADIRI PERAYAAN NATAL UNTUK SELURUH PEGAWAI BNPT DI SENTUL	2
• BNPT DAN PEMPROV JABAR KOLABORASIKAN PROGRAM PENANGGULANGAN TERORISME ' <i>PENTAHELIX</i> ' PADA TAHUN 2022	3
• KEPALA BNPT GELAR AUDIENSI BERSAMA UNPAS DALAM RANGKA PENCEGAHAN TERORISME DI LINGKUNGAN KAMPUS	4
• KEPALA BNPT TEKANKAN SELURUH PEGAWAI BNPT UNTUK WUJUDKAN KONSEP <i>PENTAHELIX</i> DALAM PENANGGULANGAN TERORISME	5
• KEPALA BNPT GANDENG MENPAN RB DAN BUPATI BANYUWANGI RESMIKAN WARUNG NKRI DI BANYUWANGI.....	7
• KEPALA BNPT PERKENALKAN KONSEP <i>PENTAHELIX</i> PADA RDP DENGAN KOMISI III DPR RI.....	8
• BNPT BERSAMA KEMENDAGRI PERKUAT DAYA TANGKAL HADAPI IDEOLOGI TERORISME DI WILAYAH DESA.....	10
• BNPT DAN BRIN JALIN KERJA SAMA PENANGGULANGAN TERORISME BERBASIS RISET	11
• BNPT GELAR SILATURAHMI DENGAN KODAM JAYA DAN TOKOH PENTING SE-JABODETABEK.....	12
KEGIATAN KEDEPUTIAN I BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN, DAN DERADIKALISASI	
• AUDIENSI DIREKTUR PERLINDUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DENGAN WAKIL KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	14
• PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL TERORISME MELALUI PENDEKATAN DIALOG PENANAMAN WAWASAN KEBANGSAAN MELALUI PENDIRIAN WARUNG NKRI DI KABUPATEN BANYUWANGI, PROVINSI JAWA TIMUR	16
• SOSIALISASI PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 3 TAHUN 2020 DAN ASISTENSI SISTEM PENGAMANAN PADA PT PERTAMINA RU IV CILACAP	18
KEGIATAN SEKRETARIAT UTAMA	
• BNPT GANDENG PEMERINTAH DAN MASYARAKAT GARUT MEMBENDUNG INFILTRASI NII	20
• BNPT DAN <i>MIND ID</i> TEKEN PKS, PERKUAT KEMITRAAN PENCEGAHAN DAN DERADIKALISASI MITRA DERADIKALISASI	22
• SEKRETARIS UTAMA DORONG PENGUATAN RENSTRA BNPT TAHUN 2020-2024 MENJADI LEBIH MODERN.....	23
• LANTIK PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ADMINISTRATOR, KEPALA BNPT DENGAN SEMANGAT <i>PENTAHELIX</i> BUKA RUANG KERJASAMA DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI.....	24
KEGIATAN SINERGISITAS ANTARKEMENTERIAN/LEMBAGA	
• TIM SINERGISITAS BNPT SIAPKAN PEMBENTUKAN KOPERASI DI KAWASAN TERPADU NUSANTARA (KTN) BATANG JAWA TENGAH.....	25

DAFTAR ISI

hal

PERKEMBANGAN KEGIATAN SINERGISITAS ANTARKEMENTERIAN/LEMBAGA BULAN JANUARI 2022

- PROGRES PENYUSUNAN DRAFT KEPMENKO POLHUKAM.....26
- PENETAPAN LOKASI PRIORITAS KTN MASING-MASING WILAYAH.....27
- MONITORING WARUNG NKRI ATAS KERJA SAMA BNPT DENGAN PT KERETA API29

TINDAK LANJUT RAN PE BULAN JANUARI TAHUN 2022

- RAPAT KOORDINASI KEDUA KELOMPOK KERJA PILAR 1, 2, 3 DAN CSO SERTA RAPAT KOORDINASI KEDUA SEKRETARIAT BERSAMA RAN PE.....31
- IMPLEMENTASI RAN PE DI JAWA TIMUR DENGAN TEMA "PENYIAPAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME YANG MENGARAH PADA KEKERASAN"32
- DISKUSI DEPUTI BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL BNPT BERSAMA DEPUTI POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN BAPPENAS, DALAM RANGKA PEMBAHASAN MENGENAI PERENCANAAN PROGRAM -PROGRAM RAN PE TAHUN ANGGARAN 2022-202433
- RAPAT KOORDINASI DAN KONSOLIDASI BNPT BERSAMA KEMENDAGRI, KEMENKEU DAN BPK TERKAIT KONSULTASI PEMBAHASAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RAN PE TAHUN 2022 DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH.....34
- SOSIALISASI RAN PE SERTA PENYIAPAN RAN PE DI PROVINSI ACEH.....35
- *ROUNDTABLE DISCUSSION* RAN PE "KEMANDIRIAN SOSIAL DAN EKONOMI KLIEN DALAM PROGRAM DERADIKALISASI, REHABILITASI DAN REINTEGRASI"36

DAFTAR SINGKATAN

BRIN	: BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
IRT	: INDEKS RISIKO TERORISME
PEM PROV	: PEMERINTAH PROVINSI
PKS	: PERJANJIAN KERJA SAMA
KRA	: KESEPAKATAN RENCANA AKSI
KTN	: KAWASAN TERPADU NUSANTARA
RAPIM	: RAPAT PIMPINAN
RAN PE	: RENCANA AKSI NASIONAL PENANGGULANGAN EKSTREMISME
RDP	: RAPAT DENGAR PENDAPAT
SEKOPER CINTA	: SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA
UNPAS	: UNIVERSITAS PASUNDAN
WARUNG NKRI	: WADAH AKUR RUKUN USAHA NURANI GELORAKAN NKRI
WNI	: WARGA NEGARA INDONESIA



BNPT

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME



2022

KEGIATAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

KEPALA BNPT SAMPAIKAN KONSEP *PENTAHHELIX* SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2022



Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) yang dilaksanakan di Kantor BNPT Jakarta pada Kamis, 6 Januari 2022. Dalam rapat ini Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. menyampaikan arah kebijakan dan program kerja BNPT tahun 2022. Kepala BNPT memberikan arah kebijakan penanggulangan terorisme tahun 2022 dilaksanakan dengan konsep *pentahelix* yang mana dalam pencapaian tujuan kelembagaan dilaksanakan dengan kerjasama dan kolaborasi secara multipihak yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, komunitas, media, hingga pelaku seni.

Konsep multipihak ini akan menggunakan seluruh potensi nasional dalam membentuk kekuatan nasional melawan ideologi radikalisme dan terorisme guna menjaga generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Dalam paparannya, Kepala BNPT membagi arah kebijakan menjadi 3 (tiga) bidang yang terdiri dari bidang operasional, bidang pembinaan, dan bidang pembangunan kekuatan. Kepala

BNPT juga menekankan dalam pelaksanaan tiga bidang tersebut perlu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga visi dan misi BNPT dapat tercapai secara optimal. Selain itu, Kepala BNPT juga mengingatkan pentingnya menguasai ruang publik dalam berjuang mengambil simpati masyarakat untuk bersama-sama menjaga Ideologi Pancasila dari terpaan ideologi transnasional yang melanda bangsa Indonesia.

Rapim di awal tahun 2022 dihadiri oleh Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IP., Inspektur BNPT, Catur Iman Pratignyo, Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E., Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol. Ibnu Suhaendra, S.IK, dan Plh. Deputy Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Brigjen Pol. Drs. Kris Erlangga A.W. yang dalam kesempatan yang sama turut memberikan paparan rencana kerja dan anggaran tahun 2022 masing-masing unit kerja.

KEPALA BNPT HADIRI PERAYAAN NATAL UNTUK SELURUH PEGAWAI BNPT DI SENTUL



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. menghadiri Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 umat Kristiani di lingkungan BNPT yang bertempat di Gereja Kristus Raja PMPP TNI Sentul pada Jumat, 7 Januari 2022. Acara Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dihadiri oleh seluruh Pejabat Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan BNPT. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPT mengimbau agar seluruh pegawai BNPT tidak lelah untuk menjadi pelopor perdamaian, meningkatkan toleransi, kolaborasi, dan selalu bersinergi dalam mencegah dan menanggulangi aksi radikal terorisme.

Kepala BNPT berharap Perayaan Natal di tahun 2021 ini dapat menjadi sarana untuk menguatkan semangat dalam menjaga toleransi antar agama dan kultur di Indonesia. Tema "Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan" dipilih dalam Perayaan Natal 2021 kali ini. Tema tersebut mengacu pada pesan natal bersama PGI dan

KWI sebagai pesan agar umat kristiani selalu saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan bela rasa. Untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan harmoni, BNPT selama ini telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian, saling menghargai, saling memahami, dan menjalin silaturahmi dalam semangat kebhinekaan.



BNPT DAN PEMPROV JABAR KOLABORASIKAN PROGRAM PENANGGULANGAN TERORISME 'PENTAHHELIX' PADA TAHUN 2022



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., mengatakan virus radikal terorisme kini hidup di tiap lini kehidupan masyarakat. Dalam dialog kebangsaan yang digelar bersama Gubernur Jawa Barat dan jajaran Forkopimda Jawa Barat pada Rabu, 12 Januari 2022, Kepala BNPT mengatakan bahwa virus tersebut telah memakan banyak korban. Tercatat lebih dari 2.100 Warga Negara Indonesia (WNI) berangkat ke negara konflik dan berafiliasi dengan kelompok teror. Mereka terhasut dengan ideologi kekerasan yang dibalut dengan narasi keagamaan. Kontra narasi penyalahgunaan nilai agama inilah yang harus diluruskan ke seluruh elemen masyarakat.

BNPT bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berkomitmen melakukan pencegahan terorisme dengan konsep "Pentahelix" atau konsep penanggulangan terorisme bersama *multi-stakeholder* yang meliputi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, serta media. Konsep ini ke depannya akan diimplementasikan melalui program Kawasan Terpadu Nusantara

(KTN) dan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan (WARUNG) NKRI, serta berkolaborasi dengan program Pemerintah Jawa Barat seperti program Ajengan Masuk Sekolah, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), Duta Pancasila, dan Duta Bela Negara.

Di saat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil antusias dan mendukung program pencegahan terorisme dan deradikalisasi bersama BNPT. Menurutnya, virus radikalisme dan terorisme harus disembuhkan dengan vaksin Pancasila. Ia juga optimis kolaborasi program BNPT dan Pemerintah Jawa Barat dapat menciptakan vaksin ampuh dalam melawan virus radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat.





KEPALA BNPT GELAR AUDIENSI BERSAMA UNPAS DALAM RANGKA PENCEGAHAN TERORISME DI LINGKUNGAN KAMPUS



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, M.H. menggelar audiensi bersama Dekan dan Rektor Universitas Pasundan (Unpas) pada Kamis, 13 Januari 2022. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT menyebut bahwa narasi agama menjadi magnet bagi kelompok teror dalam menarik simpati generasi muda. Ajaran kekerasan yang mengatasnamakan agama harus diluruskan dengan kontra narasi. Dalam hal ini, tenaga pendidik profesional di kampus harus mengedukasi anak didiknya terkait ajaran agama yang baik dan benar, serta nilai-nilai kebangsaan. Di kesempatan yang sama, Kepala BNPT juga mengenalkan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan (WARUNG) NKRI sebagai sarana kontra narasi di lingkungan kampus. Warung dengan jargon dan atribut yang menggambarkan ke-Indonesiaan ini diharapkan mampu menjadi sarana bertukar pikiran warga kampus terkait nilai Pancasila.

Lebih lanjut, Kepala BNPT juga mengenalkan konsep *pentahelix* dalam penanggulangan terorisme. Dalam konsep

ini, akademisi menjadi aktor yang terlibat dalam melakukan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Ia berharap civitas akademika Unpas dapat menjadi katalisator dalam mereduksi paham radikal terorisme di lingkungan kampus dan masyarakat.

Rektor Unpas, Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU menyambut baik kerja sama pencegahan terorisme di lingkungan kampus. Menurutnya, kejahatan terorisme harus diberantas secara serius, sama halnya dengan kejahatan narkoba di kalangan generasi muda. Kerja sama BNPT dan Unpas akan ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman.



KEPALA BNPT TEKANKAN SELURUH PEGAWAI BNPT UNTUK WUJUDKAN KONSEP *PENTAHHELIX* DALAM PENANGGULANGAN TERORISME



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor BNPT, Kabupaten Bogor pada Senin, 17 Januari 2022. Upacara Kesadaran Nasional perdana pada tahun 2022 dihadiri oleh seluruh pegawai staf hingga jajaran Pimpinan Tinggi Madya BNPT. Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam arahannya menekankan agar seluruh pegawai BNPT mewujudkan arah kebijakan penanggulangan terorisme BNPT tahun 2022 dengan konsep *pentahelix*.

Konsep *Pentahelix* Penanggulangan Terorisme ini pertama kali diperkenalkan oleh Kepala BNPT dalam rapat pimpinan (rapim) yang sebelumnya diselenggarakan di Jakarta pada Kamis, 6 Januari 2022. Konsep *pentahelix* merupakan strategi kerjasama dan kolaborasi secara multipihak yang

melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, komunitas, media hingga pelaku seni. Dalam kaitan mendukung konsep *pentahelix*, Kepala BNPT mengingatkan seluruh peserta upacara untuk meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan di antara sesama pegawai BNPT.



Dengan pelibatan semua pihak, Kepala BNPT yakin kekuatan nasional melawan ideologi radikalisme dan terorisme guna menjaga generasi saat ini dan generasi yang akan datang akan terbentuk. Konsep *pentahelix* diharapkan dapat membantu mewujudkan program Rencana Aksi Nasional

Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) dan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dengan baik. Pada kesempatan Upacara Hari Kesadaran Nasional, Kepala BNPT menambahkan pentingnya menjaga kesehatan dan protokol kesehatan di tengah Covid-19 yang masih menyebar dimasyarakat.



KEPALA BNPT GANDENG MENPAN RB DAN BUPATI BANYUWANGI RESMIKAN WARUNG NKRI DI BANYUWANGI



Mengawali kegiatan kerja di tahun 2022, Kepala BNPT, Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., meresmikan Warung NKRI di Hedon Cafe Banyuwangi bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo serta Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI (Warung NKRI) merupakan salah satu program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang melibatkan seluruh elemen bangsa dan lapisan masyarakat dalam menggiatkan dialog wawasan kebangsaan, yang kaya akan nilai toleransi, persatuan, dan gotong royong.

Dikenal sebagai tokoh yang menggandeng pemuda – pemudi yang memiliki narasi kebangsaan yang luar biasa, Menteri PAN RB mengapresiasi hadirnya Warung NKRI wadah

kumpul masyarakat. Beliau menilai tantangan bangsa hingga saat ini adalah masalah radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Peran tokoh ulama, guru, sangatlah dibutuhkan untuk membangun ideologi masyarakat yang cinta damai dan saling menyayangi meski di tengah ragam perbedaan.

Menutup dialog, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menceritakan inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi hingga mendapat gelar Kabupaten Terinovatif sejak tahun 2018-2021. Inovasi di Banyuwangi dikembangkan mulai dari munculnya permasalahan dan keinginan untuk mempercepat penyelesaiannya. Inovasi yang baru pun dihadirkan dengan Banyuwangi Reborn yang memiliki 3 pilar yakni tangani pandemi, pulihkan ekonomi dan merajut harmoni.

KEPALA BNPT PERKENALKAN KONSEP *PENTAHHELIX* PADA RDP DENGAN KOMISI III DPR RI



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, M.H. menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI untuk membahas evaluasi capaian kinerja hingga *roadmap* BNPT tahun 2022 di Jakarta pada Selasa, 25 Januari 2022. Membuka paparan, Kepala BNPT memperkenalkan konsep *pentahelix* dalam upaya penanggulangan terorisme. Kebijakan *Pentahelix* merupakan sebuah model pencapaian dengan kerjasama dan kolaborasi secara multipihak yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas, masyarakat, termasuk pelaku seni dan budaya. Hal ini akan membentuk kekuatan nasional melawan ideologi radikalisme dan terorisme.

Kepala BNPT juga menjabarkan kinerja tahun 2021 di mana BNPT telah melakukan penyesuaian tugas fungsi sebagaimana

amanat UU Nomor 5 Tahun 2018. Sebagai contoh, dalam bidang pencegahan, BNPT telah melaksanakan pemantauan terhadap situs dan akun di dunia maya yang berpotensi mengandung dan menyebarkan pemahaman radikal dan telah melakukan proses *take down* bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi.



Kepala BNPT juga menjelaskan tentang survei Indeks Risiko Terorisme (IRT) yang dilaksanakan BNPT melalui FKPT 32 Provinsi bermitra dengan lembaga survei kredibel. Sementara itu, dalam bidang koordinasi antarpenegak hukum BNPT telah menjalankan perannya dalam mengoordinasikan aparat penegak hukum, termasuk dalam upaya pengungkapan melalui mekanisme *preventive justice*. Sedangkan terkait dengan pendanaan terorisme, sepanjang tahun 2021 BNPT telah mengambil bagian dalam merilis Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021, dan telah mengidentifikasi yayasan dan lembaga amal yang terafiliasi dengan kelompok teror.

Dalam bidang kerjasama internasional, Kepala BNPT menerangkan bahwa BNPT berperan aktif dalam memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme dengan tetap mengedepankan kedaulatan negara. Di tahun 2022 BNPT berencana melaksanakan kerjasama dengan PPAK terkait analisa aliran dana yang diduga berkaitan dengan pendanaan terorisme.

Atas paparan tersebut, Komisi III DPR RI mendukung upaya BNPT dalam melakukan kolaborasi dan koordinasi dalam forum kerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum, Kementerian/Lembaga, Lembaga sejenis dari negara-negara lain, dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi BNPT.



BNPT BERSAMA KEMENDAGRI PERKUAT DAYA TANGKAL HADAPI IDEOLOGI TERORISME DI WILAYAH DESA



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perkuat kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam upaya penanggulangan terorisme yang lebih komprehensif. Melalui audiensi bersama Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd yang dilaksanakan pada Rabu, 26 Januari 2022, Kepala BNPT Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. mendorong upaya pencegahan terorisme di lingkungan desa. Menurut Kepala BNPT, desa harus memiliki daya tangkal terhadap paham radikal yang mengarah pada terorisme. Ia juga mendorong peran aparat desa dalam pencegahan terorisme.

Sebagai tindak lanjut dari MoU BNPT dan Kemendagri yang disepakati pada tahun

2021, bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri mendukung penuh keterlibatan Ditjen Pemerintahan Desa dalam meningkatkan ketahanan desa dari ideologi kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Sinkronisasi kegiatan akan segera dilakukan setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) disepakati oleh unit kerja terkait baik di BNPT maupun Kemendagri. Kepala BNPT dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri berharap program – program peningkatan aparat desa dapat segera direalisasikan. Melalui unit pemerintahan di tingkat dasar, desa dapat menjadi fondasi yang tangguh dalam membangun bangsa yang bebas dari radikal terorisme.

BNPT DAN BRIN JALIN KERJA SAMA PENANGGULANGAN TERORISME BERBASIS RISET



Dalam rangka penanggulangan terorisme berbasis riset, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menanggulangi kejahatan terorisme yang semakin kompleks dan dinamis, sehingga perlu terobosan baru dalam menanggulanginya. Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. dalam audiensi dengan Kepala BRIN pada Rabu, 26 Januari 2022 menjelaskan bahwa riset menjadi penting dalam menentukan langkah strategis BNPT bersama Kementerian/Lembaga dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ini.

BNPT terus memaksimalkan upaya penanggulangan terorisme dari hulu ke hilir. Mengingat banyaknya variabel yang harus diukur, riset menjadi kunci penting. Kepala BNPT berharap kerja sama dengan BRIN dapat memberikan hasil riset yang tajam dan

dapat menjadi rujukan. Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko dalam kesempatan yang sama juga menambahkan bahwa aspek riset memang sangat penting. BRIN harus mendukung BNPT dalam meningkatkan kualitas riset demi penanggulangan terorisme yang efektif dan berdampak. Beliau pun berharap BNPT dapat memberikan sosialisasi dalam rangka mengentas bibit radikalisme di tubuh BRIN.



BNPT GELAR SILATURAHMI DENGAN KODAM JAYA DAN TOKOH PENTING SE-JABODETABEK



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. menggelar silaturahmi dengan Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Untung Budiharto beserta jajaran dan didampingi oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. K.H. Nasaruddin Umar, para tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda se-Jabodetabek dalam rangka memperkokoh toleransi untuk Jakarta yang aman dan damai di Aula Sudirman Markas Kodam Jaya, Jakarta pada Kamis, 27 Januari 2022. Dalam kegiatan silaturahmi dengan Kodam Jaya dan para tokoh penting se-Jabodetabek tersebut, Kepala BNPT menekankan kepada warganet untuk bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan sosial media. BNPT selama ini telah melakukan langkah mitigasi dengan memperkuat literasi di dunia maya, sebagai langkah masyarakat untuk tetap waspada

terhadap konten radikalisme dan terorisme. Tak hanya melalui literasi, kontra narasi di sosial media juga berperan penting dalam merangkul masyarakat untuk bijak memilah informasi dan menyampaikannya dengan baik dan benar.



Sementara itu, Mayjen TNI Untung Budiharto menjelaskan hadirnya Kepala BNPT dan Imam Besar Masjid Istiqlal menjadi bahan kerja untuk melanjutkan perjuangan dalam mengikis mata rantai penyebaran paham radikal terorisme di Tanah Air. Beliau juga menjelaskan langkah – langkah pencegahan paham radikal terorisme melalui internal terlebih dahulu di lingkungan Kodam,

yang dilanjutkan dengan membuka komunikasi di setiap satuan sesuai perintah Kepala Staf Angkatan Darat untuk membuat peta kemungkinan adanya kelompok radikal di daerah, dan yang terakhir adalah melakukan edukasi tentang bahaya radikalisme di daerah – daerah dengan menggunakan satuan-satuan yang ada di daerah.







BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

2022

KEGIATAN KEDEPUTIAN I BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN DERADIKALISASI

AUDIENSI DIREKTUR PERLINDUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DENGAN WAKIL KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Direktorat Perlindungan, melaksanakan audiensi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada hari Kamis, 13 Januari 2022. Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait tindak lanjut rekomendasi rehabilitasi psikososial terhadap korban tindak pidana terorisme anggota POLRI yang terdampak tindak pidana terorisme.

Kedatangan Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol. Drs. Imam Margono beserta jajaran di Mabes POLRI DKI Jakarta disambut baik oleh Wakil Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si, Kepala Divisi Hukum Polri (Kadivkum Polri), Irjen Pol. Dr. Remigius Sigid Tri Hardjanto, S.H., M.Si., Kepala Densus 88, Irjen Pol. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., Kepala Biro Perawatan Personel (Karowatpers SSDM Polri) Brigjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si.,

Sekretaris Biro Pengamanan Internal, Divisi Profesi dan Pengamanan (Sesropaminal Divpropam), Kombes Pol. Denny Setia Nugraha Nasution, S.I.K., M.H.

Dalam audiensi tersebut, Direktur Perlindungan BNPT mengajukan permohonan dan rekomendasi khusus bagi 18 (delapan



belas) anggota POLRI penyintas tindak pidana terorisme yang telah mendapatkan Surat Penetapan Korban dari BNPT dan penyidik POLRI.

Hak-hak penyintas seperti kebutuhan medis, pemulihan psikologis dan psikososial, maupun kompensasi telah diberikan kepada sebagian besar penyintas tindak pidana terorisme, meski masih terdapat 7 (tujuh) penyintas tindak pidana terorisme yang masih menunggu waktu penerimaan kompensasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan ditindak lanjuti oleh Densus 88 AT dengan berkoordinasi dengan LPSK.

Selanjutnya, apresiasi kepada penyintas tindak pidana terorisme POLRI terkait mutasi, pendidikan atau kenaikan pangkat akan diberikan berdasarkan kebijakan khusus dari POLRI dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait serta mengikuti mekanisme internal POLRI.

Dari hasil audiensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Wakapolri beserta jajaran mendukung penuh atas permohonan rehabilitasi psikososial dari anggota POLRI yang diajukan meski tetap dilakukan peninjauan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme internal dan kebijakan pimpinan POLRI.



PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL TERORISME MELALUI PENDEKATAN DIALOG PENANAMAN WAWASAN KEBANGSAAN MELALUI PENDIRIAN WARUNG NKRI DI KABUPATEN BANYUWANGI, PROVINSI JAWA TIMUR



Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI (Warung NKRI) merupakan salah satu program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang melibatkan seluruh elemen bangsa dan lapisan masyarakat dalam menggiatkan dialog wawasan kebangsaan, yang kaya akan nilai toleransi, persatuan, dan gotong royong.

Mengawali kegiatan kerja di tahun 2022, Kepala BNPT, Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., meresmikan Warung NKRI di Hedon Cafe Banyuwangi bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, serta Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani pada hari Kamis, 20 Januari 2022.

Program Warung NKRI yang telah dilaksanakan dan didirikan di sejumlah daerah di Indonesia seperti di Solo, Surabaya, dan Malang ini dihadiri oleh beberapa

lapisan masyarakat, seperti akademisi, tokoh agama dan tokoh adat serta mitra deradikalisasi.

Bupati Banyuwangi menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan Warung NKRI yang dilakukan di Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi telah didapuk sebagai kabupaten ter-inovatif selama empat kali berturut-turut dari tahun 2018. Dengan banyaknya UMKM dan karakter kotanya sebagai kota pariwisata,



Banyuwangi ingin memberikan sumbangsinya dengan berpartisipasi melalui didirikannya Warung NKRI ini. Adanya Warung NKRI diharapkan dapat menjadi wadah dialog tentang wawasan kebangsaan untuk pencegahan paham radikal.

Tujuan didirikannya Warung NKRI sebagai bentuk BNPT hadir melalui kebijakan *Pentahelix* dalam penanggulangan terorisme yang merupakan model pencapaian tujuan kelembagaan yang dilaksanakan dengan kerjasama dan kolaborasi secara multipihak yang melibatkan 6 (enam) unsur yakni Pemerintah, Akademisi, Pelaku usaha, Media, dan Komunitas/Masyarakat termasuk Pelaku Seni dan Budaya. Dialog kebangsaan Warung NKRI diselenggarakan dengan melihat keadaan bangsa yang multibudaya dan majemuk, dengan menjadikannya kunci persatuan Indonesia karena bila tidak diolah

dengan bijak, keanekaragaman juga bisa menjadi pintu konflik sosial dan horizontal. Dialog Kebangsaan Warung NKRI ini adalah salah satu upaya untuk bersinergi bersama dalam semangat toleransi dan merasa saling memiliki dalam bingkai NKRI.

Warung NKRI juga menjadi wadah bagi mitra deradikalisasi untuk meningkatkan kondisi ekonomi mitra deradikalisasi yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan oleh statusnya. Menpan RB juga menyampaikan dukungan ini serta harapan dengan adanya program Warung NKRI yang didirikan di Banyuwangi yang merupakan kota pariwisata, dapat membuka peluang untuk dibukanya warung-warung kecil untuk membantu UMKM masyarakat, yang nantinya selain digunakan untuk berjualan tapi juga digunakan untuk berdialog tentang wawasan kebangsaan.



SOSIALISASI PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 3 TAHUN 2020 DAN ASISTENSI SISTEM PENGAMANAN PADA PT PERTAMINA RU IV CILACAP



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Direktorat Perlindungan melaksanakan Sosialisasi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Asistensi Sistem Pengamanan pada PT Pertamina (Persero) RU IV.

Bertempat di PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap, Jawa Tengah pada hari Rabu, 26 Januari 2022, Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol. Drs. Imam Margono beserta jajaran disambut oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bisnis PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Johan NB Nababan, Penanggung Jawab Sementara *General Manager* PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap Arief Budianto, Jajaran

Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan Personil Pengamanan di Lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan penilaian sistem keamanan pada PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap agar mampu dalam menghadapi ancaman aksi tindak pidana terorisme.



Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dimana hari kedua pada hari Kamis, 27 Januari 2022, dilaksanakan kegiatan asistensi sistem pengamanan pada PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap. Beberapa hal yang disampaikan oleh BNPT, antara lain terkait Laporan hasil *Pre Assessment Standard Minimum* Pengamanan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020, Pengelolaan Risiko Tindak Pidana Terorisme yang Bersumber dari Dalam dan dari Luar (*Insider Threat and Outsider Threat*) serta *Background Check* dalam Pengelolaan Risiko Tindak Pidana

Terorisme.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap berkomitmen untuk melengkapi sistem manajemen keamanannya sesuai dengan standar yang tercantum dalam Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020, sehingga diharapkan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap dapat menerima sertifikasi dari BNPT atas pemenuhan norma dan standar yang tercantum dalam Pedoman Pelindungan Sarana dan Prasarana dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.







BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

2022

KEGIATAN SESTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

BNPT GANDENG PEMERINTAH DAN MASYARAKAT GARUT MEMBENDUNG INFILTRASI NII



Menanggapi kemunculan Negara Islam Indonesia (NII) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempererat kerja sama dengan pemerintah daerah dan unsur masyarakat dalam mencegah meluasnya doktrin radikal terorisme tersebut. Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IP., mengatakan infiltrasi NII yang belakangan ini terjadi di Garut terjadi juga di beberapa daerah lain di Indonesia. Ancaman infiltrasi tersebut menjadi konsen BNPT dalam kegiatan Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan BNPT bersama Forkopimda, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama dalam rangka pencegahan radikal terorisme di Kabupaten Garut. Sekretaris Utama BNPT menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam membendung pergerakan kelompok radikal. Sestama BNPT mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Garut,

MUI Kabupaten Garut dan kelompok masyarakat anti radikalisme yang responsif terhadap gerakan NII di Garut. Sementara itu, salah seorang peserta menjelaskan NII telah menjadi ancaman riil yang telah menyusun siasat tindakan makar. Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E., menjelaskan



upaya penanggulangan terorisme dengan konsep *Pentahelix*. Konsep ini mengenalkan kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat/komunitas dalam mencegah terorisme. Menurutnya, membangun kohesi sosial menjadi penting utamanya dalam mencegah infiltrasi paham radikal terorisme di masyarakat. Konsep *pentahelix* ini akan direalisasikan melalui

Kawasan Terpadu Nusantara (KTN). Kawasan ini akan menjadi sarana bagi mitra deradikalisasi dan penyintas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sekaligus menjadi tempat deradikalisasi dalam rangka reintegrasi sosial.



BNPT DAN MIND ID TEKEN PKS, PERKUAT KEMITRAAN PENCEGAHAN DAN DERADIKALISASI MITRA DERADIKALISASI



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perkuat kemitraan bersama *Mining Industry Indonesia (MIND ID)*. Hal tersebut diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati di Jakarta. BNPT dan *MIND ID* berkomitmen untuk melakukan pencegahan terorisme serta deradikalisasi bagi mitra deradikalisasi BNPT. Kerja sama ini merupakan wujud dari konsep *pentahelix* atau multipihak dimana BNPT menggandeng unsur BUMN *holding* industri pertambangan dalam penanggulangan terorisme. Dalam bidang deradikalisasi, Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar menjelaskan program Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) sebagai upaya menyukseskan reintegrasi sosial bagi mitra deradikalisasi. Kepala BNPT berharap *MIND ID* dapat

memberikan ide-ide baru untuk KTN.

Boy Rafli juga berkomitmen untuk menciptakan *MIND ID* yang bebas dari paham radikal terorisme. Kepala BNPT menyambut energi baik yang akan tercipta melalui PKS “Sinergisitas Pencegahan Terorisme”. Menurutnya kekuatan nasional dapat terbentuk jika ada kolaborasi seluruh komponen bangsa. Sementara itu Direktur Hubungan Kelembagaan *MIND ID*, Dany Amrul Ichdan, menyatakan program KTN BNPT sejalan dengan *sustainability pathway* dalam pilar *community and society*, serta *people development*. Pengembangan SDM ini tidak hanya berbicara pada aspek kesejahteraan dari sisi ekonomi saja, tetapi juga pola pikir penerima Direktur Hubungan Kelembagaan *MIND ID*, Dany Amrul.

SEKRETARIS UTAMA DORONG PENGUATAN RENSTRA BNPT TAHUN 2020-2024 MENJADI LEBIH MODERN



Dalam rangka memperkuat Rencana Strategis (Renstra) yang *modern*, implementatif dan efektif Sekretaris Utama BNPT Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IP, memimpin Rapat Revisi Renstra BNPT 2020-2024 yang dihadiri oleh jajaran pejabat BNPT dan PT Integrasi Tri Tama Cendekia. Renstra BNPT telah disusun berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020. Di dalamnya dijabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 tahun.

Sebagai lembaga koordinator penanggulangan terorisme, BNPT harus

tanggap dengan dinamika perkembangan terorisme di level domestik dan internasional. Maka dari itu, Renstra harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peta proses bisnis dan tren terorisme agar tetap sejalan dengan visi misi Presiden. Sekretaris Utama BNPT menyampaikan perlunya dukungan internal BNPT dalam penyelarasan Renstra. Menurutnya Renstra dapat diperkaya dengan data dan fakta yang dimiliki tiap unit kerja agar tujuan strategis dalam penanggulangan terorisme dapat tercapai. PT. Interasi Tri Tama Cendekia siap mendukung pengatan *core business* BNPT melalui penyelarasan dokumen renstra.

LANTIK PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ADMINISTRATOR, KEPALA BNPT DENGAN SEMANGAT PENTAHHELIX BUKA RUANG KERJASAMA DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di gedung BUMN. Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar M.H berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk bersinergi dengan semua pihak dalam rangka mewujudkan keberhasilan tugas dan fungsi BNPT. Kepala BNPT berpesan Kepada Direktur Penindakan, agar dalam menjalankan fungsinya dapat mengedepankan kosep koordinasi yang baik dengan segala pihak yang terkait. Kepala Kasubdit TI yang baru, Kepala BNPT berpesan agar sarana dan prasarana yang dimiliki Subdit TI dapat menunjang upaya pemetaan dan potensi kerawanan tindak pidana terorisme. Sementara itu, kepada Kepala Bagian Hukum dan Humas, Boy Rafli Amar menginginkan agar Humas dapat menjadi bagian penguatan kepercayaan publik BNPT. Kepada Kasubdit

Pemulihan Korban yang baru, Kepala BNPT agar ruang kerjasama terus dibuka untuk membantu penyintas (korban terorisme). Diketahui kegiatan pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan BNPT dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya, Pratama dan Pejabat Administrator serta para anggota DWP BNPT.





BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

2022

KEGIATAN SINERGISITAS ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA

TIM SINERGISITAS BNPT SIAPKAN PEMBENTUKAN KOPERASI DI KAWASAN TERPADU NUSANTARA (KTN) BATANG JAWA TENGAH



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan membentuk koperasi di Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) yang terletak di Kasepuhan Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Rencana pembentukan koperasi bertujuan sebagai wadah gotong royong dan kebersamaan dalam membangun kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan misi program KTN yang mengedepankan kesejahteraan ekonomi sosial bagi mitra deradikalisasi dan masyarakat setempat. Menyambut program tersebut,

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Ir. Budiyanto, M.Pi, M.Hum., mengatakan pembentukan koperasi pada Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dapat memberikan kegiatan positif kepada masyarakat di sekitar lokasi dalam meningkatkan pendapatan. Secara umum, pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) merupakan konsep deradikalisasi berbasis kesejahteraan kepada mitra derad dan masyarakat sekitar melalui kegiatan berbasis ekonomi, edukasi, dan wisata.



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

2022

**PERKEMBANGAN KEGIATAN
SINERGISITAS
ANTARKEMENTERIAN/LEMBAGA
BULAN JANUARI 2022**

PROGRES PENYUSUNAN *DRAFT* KEPMENKO POLHUKAM

Dalam bulan ini, Kegiatan sinergisitas diprioritaskan dalam 3 (tiga) agenda berikut:

1. Penyusunan *Draft* Kepmenko Polhukam dan Skep Sestama sudah dibuat. Selain itu, Pengiriman Permohonan Penerbitan Kepmenko Polhukam dari BNPT sudah dilakukan.

2. Perekrutan Tenaga Pendukung Sinergisitas di Wilayah Pusat dan Daerah. Tenaga Pendukung Sinergisitas di tingkat pusat sudah dilaksanakan dengan komposisi sebagai berikut: Tim Tenaga Ahli (Sinergisitas dan KTN) dan Tim PNPM. Perekrutan Fasda (Perpanjangan) dan Rekrutmen untuk Fasda Kab. Bekasi. Khusus untuk Fasda Kab. Bekasi, calon sudah diwawancarai.

3. Konfirmasi Rencana Aksi Kementerian /Lembaga Tahun 2022. Proses rekonfirmasi terus dilakukan oleh tim Penghubung K/L. Jumlah K/L yang sudah rekonfirmasi rencana aksi adalah : Bidang Polhukam 8 K/L, Bidang

PMK 5 K/L, Bidang Perekonomian 7 K/L, dan Bidang Kemaritiman dan Investasi 4 K/L. Total 34 K/L yang telah konfirmasi rencana aksi untuk tahun 2022. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan Finalisasi Rencana Aksi Kementerian/Lembaga Tahun 2022, Penyusunan *Draft* Dokumen Kesepakatan Rencana Aksi (KRA) masing-masing Kementerian/Lembaga Tahun 2022, serta Persiapan Penadatangan Dokumen Kesepakatan Rencana Aksi (KRA) masing-masing Kementerian/Lembaga Tahun 2022.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada bulan Februari mendatang yaitu Pengawalan Penerbitan Kepmenko Polhukam dan Skep Sestama, Persiapan Pembekalan Satgas Sinergisitas (Satgas Pusat dan Wilayah) oleh Kepala BNPT, serta Proses Revisi dan Penyusunan SOP, Petunjuk Teknis, dan Buku Panduan Kegiatan Sinergisitas Tahun 2022.

PENETAPAN LOKASI PRIORITAS KTN MASING-MASING WILAYAH



Perkembangan kegiatan Kawasan Terpadu Nusantara pada bulan Januari difokuskan salah satunya dengan Penetapan Lokasi Prioritas KTN masing-masing wilayah. Berikut merupakan lokus prioritas KTN yang telah dihimpun oleh BNPT:

1. Sulawesi Tengah (KTN Kab Morowali berlokasi di Desa Margamulya, Kecamatan Bungku Barat, Kab Morowali (luas 300 ha, lahan milik pemkab, potensi perkebunan dan peternakan).
2. NTB (KTN Batulanteh Kab Sumbawa) berlokasi di Desa Pernek, Kec Moyo Hulu, Kab. Sumbawa (luas 466 ha, lahan milik Perhutani)
3. Jawa Timur (KTN Turen Kab Malang) berlokasi di Desa Turen, Kecamatan Turen, Kab. Malang (Luas 15 ha, lahan milik Pemkab, Potensi Pertanian, Peternakan).
4. Jawa Tengah (KTN Kab. Temanggung) berlokasi di Desa Mranggen Tengah & Desa

Candisari, Kec Bansari, Kab. Temanggung (Luas lahan 243 ha, Lahan milik perhutani, potensi perkebunan kopi).

5. Jawa Barat (KTN Kab Garut) berlokasi di Desa Harumansari, Kecamatan Kadunggora, Kab. Garut (luas lahan 85 ha, Perhutani, LMDH Buana Mukti, Potensi Perkebunan, Peternakan, Wisata).

Selain penetapan lokasi prioritas KTN tersebut, BNPT juga menindaklanjuti arahan Kepala BNPT terkait dengan Pembentukan Koperasi KTN di masing-masing wilayah dengan progress sebagai berikut:

1. Sulawesi Tengah (KTN Kab Morowali) berlokasi di Desa Margamulya, Kecamatan Bungku Barat bersama dengan anggota Kelompok Tani dan Bumdes Koperasi. Koperasi di wilayah ini berstatus sedang proses pembentukan.
2. NTB (KTN Batulanteh Kab Sumbawa) berlokasi di Desa Pernek, Kec Moyo Hulu, Kab

Sumbawa bersama dengan LMDH Koperasi di wilayah ini berstatus sedang proses pembentukan.

3. Jawa Timur (KTN Turen Kab Malang) berlokasi di Desa Turen, Kecamatan Turen, Kab Malang yang akan memanfaatkan Koperasi Artha Harmoni Bangsa (yang sudah terbentuk)

4. Jawa Tengah (KTN Kab. Temanggung) berlokasi di Desa Mranggen Tengah & Desa Candisari, Kec Bansari, Kab. Temanggung dengan memanfaatkan existing koperasi bernama Koperasi Kopi Rejo Mulyo

5. Jawa Barat (KTN Kab Garut) berlokasi di Desa Harumansari, Kecamatan Kadunggora, Kab Garut dengan memanfaatkan existing koperasi bernama Koperasi Harmoni Haruman Garut yang sudah terbentuk dan sedang

dalam proses pengurusan legalitas hukumnya.

KTN pada bulan Januari ini melakukan Penyusunan Proposal KTN berupa Pemetaan Program Prioritas di KTN, Pemetaan Kebutuhan Prioritas, Penyusunan Proposal. Adapun progres Proposal KTN semua wilayah dapat dikoordinasikan dan dikirimkan ke *Stakeholder Kemitraan* (K/L, BUMN/BUMD, Swasta/CSR, Perguruan Tinggi, Calon *Off Taker*) seperti halnya MOU dengan Bapak Kartono (*Off Taker Jagung*) serta MOU dengan RNI (*Off Taker Gula*).

KTN juga melanjutkan rencana Pelaksanaan Aksi di Lokasi KTN melalui upaya Koordinasi dengan Tim KTN Daerah, Koordinasi dengan Mitra Pendukung dan Persiapan Launching KTN serta Kunjungan PT Smelting di KTN Turen (16 Februari 2022).



MONITORING WARUNG NKRI ATAS KERJA SAMA BNPT DENGAN PT KERETA API



Monitoring Perkembangan Kegiatan Warung NKRI Kerjasama PT Kereta API dilaksanakan oleh Tim Sinergisitas bersama Tim Pemulihan Korban BNPT dan Tim Derad serta Fasda Kota Surabaya melalui upaya dengan melakukan pertemuan dengan Pengelola Warung NKRI Stasiun Surabaya (*Virtual Meeting*). Sebagai masukan informasi, Warung NKRI Kota Surabaya berjalan, namun masih ada kendala yang dihadapi. Kemudian, Tim Sinergisitas melakukan koordinasi dengan Fasda Kab Sukoharjo untuk *Monitoring* Warung NKRI Stasiun Solo dengan detail laporan perkembangan sebagai berikut:

1. Stasiun Solo Balapan sementara terhenti kegiatannya disebabkan: sepi nya pembeli setelah beberapa hari pasca *opening*; Ketidadaan pengurus yg ditunjuk langsung oleh Tim Derad dalam hal ini mitra a.n Kristianto alias Mas Abby yg juga memiliki usaha diluar Warung NKRI; Keterbatasan akses Warung

NKRI dalam hal fasilitas listrik, air, dan biaya parkir yg tidak bisa di cover oleh Pengurus dari Mitra Derad.

2. Saat ini *stand/booth* Warung NKRI di Stasiun Balapan yg disediakan oleh PT. KAI Daops 6 masih berada di lokasi, namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha.

3. Ketidadaan suplai-suplai barang dari Mitra Derad lainnya di wilayah Solo Raya, karena prospek pemasaran di Warung NKRI Solo Balapan yg belum begitu baik.

Tim Sinergisitas juga melakukan koordinasi dengan Fasda Kab Malang untuk *monitoring* Perkembangan Warung NKRI di Stasiun Kab Malang. Warung NKRI di Kab Malang belum optimal karena *management* pengelolaan termasuk siapa yang harus menjaga *stand* setiap hari, serta produk-produk mantan teroris yang terbatas.

Pengaktifan Warung NKRI Stasiun Surabaya, Stasiun Solo dan Stasiun Malang.

Mediasi dengan PT KAI (CSR) untuk pengurangan biaya operasional dan bantuan pengembangan Warung NKRI Perbaikan Manajemen Warung NKRI yang lebih efisien dan efektif Khusus untuk Warung NKRI di Stasiun Solo Balapan akan diaktifkan dengan perbaikan manajemen warung NKRI yang lebih efisien dan efektif Mediasi dengan PT Kereta Api (CSR) agar dapat mengurangi biaya operasional Warung NKRI Stasiun Solo Balapan Aktivitas *Launching*

Warung NKRI beserta dengan *Monitoring* perkembangan kegiatan Warung NKRI bertujuan untuk Membangun Sinergi dengan Mitra Binaan BNPT. Pada bulan ini pula, BNPT melakukan pembuatan panduan penyelenggaraan Warung NKRI melalui upaya penyusunan *Draft* Panduan Warung NKRI dan dilanjutkan dengan proses Finalisasi Buku Panduan Warung NKRI pada bulan Februari 2022.



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

2022

TINDAK LANJUT KEGIATAN RAN PE BULAN JANUARI TAHUN 2022

RAPAT KOORDINASI KEDUA KELOMPOK KERJA PILAR 1, 2, 3 DAN CSO SERTA RAPAT KOORDINASI KEDUA SEKRETARIAT BERSAMA RAN PE



Rakor ke-2 Pokja RAN PE dilaksanakan pada Tanggal 22,23 dan 28 Desember 2021 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta. Rakor ini dibuka dan dipimpin oleh Sestama BNPT dan dihadiri perwakilan K/L anggota Pokja dan perwakilan masyarakat sipil. Pada kesempatan tersebut masing-masing Ketua Pokja Pilar 1, 2 dan 3 menyampaikan perkembangan pelaksanaan RAN PE merujuk pada pelaporan yang telah disampaikan oleh setiap K/L melalui *platform I-Khub*. Sementara Rakor ke-2 Sekber RAN PE dipimpin oleh Kepala BNPT dan dihadiri K/L anggota Sekber.

Secara umum hasil Rakor mencatat:

1. Pelaksanaan RAN PE tahun 2021 berfokus pada penyiapan infrastruktur (Sekber, Pokja, Perban).
 2. Aksi-aksi yang dapat dilaksanakan K/L pada 2021 sebagian besar merupakan aksi-aksi yang berkesesuaian dengan RAN PE.
 3. Terdapat sejumlah kendala pelaksanaan RAN PE antara lain: dukungan kebijakan internal, belum menjadi prioritas, kendala penganggaran, dan belum optimal koordinasi.
- Sejumlah hal yang kemudian perlu untuk

ditindaklanjuti pada 2022 antara lain:

1. Menyampaikan pelaporan kepada Presiden dan publik terkait implementasi RAN PE 2021.
2. Melaksanakan Rakor pertama Sekber dan Pokja RAN PE pada kesempatan pertama di 2022, dalam rangka membahas komitmen K/L terhadap pelaksanaan RAN PE tahun 2022.
3. Memulai operasionalisasi secara penuh Sekber RAN PE di 2022.

Sebagai catatan secara internal BNPT sedang dalam proses finalisasi pembentukan tim Sekber RAN PE yang berasal dari unsur-unsur unit kerja di BNPT.

Adapun tindak lanjut dari kegiatan ini berupa agenda akan terselenggaranya Rapat Pertama Pokja RAN PE di tahun 2022 dengan mengundang Biro Perencanaan masing-masing K/L. Kegiatan ini bertujuan melihat komitmen masing-masing K/L dalam melaksanakan RAN PE di Tahun 2022 dan memastikan sejauh mana kegiatan tersebut dapat sejalan dengan Rencana Kerja di masing-masing K/L. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan dukungan kebijakan serta penganggaran di masing-masing K/L terkait.

IMPLEMENTASI RAN PE DI JAWA TIMUR DENGAN TEMA "PENYIAPAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME YANG MENGARAH PADA KEKERASAN"



Implementasi ini dilaksanakan pada Tanggal 12 Januari 2022 dalam kegiatan *Virtual Meeting* yang diselenggarakan oleh Fathayat NU Jawa Timur yang bekerjasama dengan AMAN Indonesia dan UN Women. Kegiatan melibatkan Dinsos Jatim, Dinas Pendidikan Jatim, DP3AK Jatim, Dinas Kesehatan Jatim, Bakesbangpol Jatim, FKUB, Kemenag, FKPT Jatim dan perwakilan masyarakat sipil di Jawa Timur.

Kegiatan bertujuan untuk mendorong implementasi RAN PE di Jatim; memperkuat kerjasama masyarakat sipil dengan pemda dalam implementasi RAN PE; serta mengakomodasi masukan dan gagasan partisipan terkait kemungkinan implementasi RAN PE di daerah dapat dituangkan dalam RAD.

Kegiatan menghadirkan narasumber antara lain: BNPT (diwakili Analis Kebijakan Ahli Muda), perwakilan Ditjen Polpum Kemendagri dan Kepala Bakesbangpol Jatim. Dalam kesempatan tersebut BNPT mensosialisasikan mengenai RAN PE, pentingnya peran dan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan RAN PE, apresiasi

terhadap berbagai inisiatif yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pentingnya mengintegrasikan perspektif pengarusutamaan gender dalam implementasi RAN PE di daerah.

Hal-hal yang menjadi catatan dalam kegiatan:

- Masyarakat dan pemangku kepentingan di Jatim menyambut baik disahkannya Perpres 7/2021 tentang RAN PE.

- Implementasi RAN PE di Jatim merujuk pada SE Mendagri No. 339/5267/Sj tanggal 29 September 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan di Jatim dan praktik-praktik baik yang selama ini telah dilaksanakan pemda maupun masyarakat sipil di Jatim.

- Meskipun tidak menjadi amanat Perpres, namun implementasi RAN PE di Jatim dipandang sebagian peserta diskusi penting dan efektif untuk dirumuskan dalam bentuk RAD di bawah payung hukum yang Peraturan Gubernur.

DISKUSI DEPUTI BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL BNPT BERSAMA DEPUTI POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN BAPPENAS, DALAM RANGKA PEMBAHASAN MENGENAI PERENCANAAN PROGRAM-PROGRAM RAN PE TAHUN ANGGARAN 2022-2024



Diskusi dalam rangka pembahasan mengenai perencanaan program-program RAN PE Tahun Anggaran 2022-2024 dilaksanakan pada Tanggal 19 Januari 2022. Diskusi dilaksanakan secara informal antara Deputi III, didampingi Dir. RM dengan Deputi Politik, Hukum dan Hankam Bappenas. Adapun catatan hasil diskusi:

- Bappenas menyampaikan perlunya sinkronisasi perencanaan penganggaran terhadap Program-Program yang ada di BNPT seperti RAN PE, Sinergitas, KKTN dan program lainnya.
- Bappenas ingin berkoordinasi lebih lanjut bersama BNPT dan Kemendagri khususnya

dalam mengawal implementasi RAN PE agar masuk dalam Sistem RKP Tahun 2023.

- Bappenas juga menyampaikan perlunya untuk membuat Dashboard yang berguna untuk monitoring dan evaluasi RAN PE, sehingga pelaksanaan Implementasi dari RAN PE akan menjadi lebih terukur dan efektif.

Selain itu, Deputi Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas akan menjadi salah satu Narasumber pada Rapat Pertama Pokja RAN PE yang akan dilaksanakan pada Februari/Maret 2022 untuk memberikan gambaran dan pandangan terkait perencanaan dalam Pelaksanaan RAN PE.

RAPAT KOORDINASI DAN KONSOLIDASI BNPT BERSAMA KEMENDAGRI, KEMENKEU DAN BPK TERKAIT KONSULTASI PEMBAHASAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RAN PE TAHUN 2022 DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH



Rakor yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Januari 2022 ini dihadiri oleh Deputi III BNPT, Dir. RM, Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas BNPT dan Inspektur BNPT bersama Kemendagri (Ditjen Polpum), Perwakilan Kemenkeu (Direktorat Jenderal Anggaran) dan Perwakilan dari BPK.

Pada pertemuan disampaikan bahwa peraturan yang terbaru, yakni UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No 339/267 perihal Pencegahan Ekstremisme Kekerasan Tingkat Daerah telah memberikan payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada

Terorisme. Oleh karena itu BPK dalam hal ini memberikan pandangan bahwa pertanggung jawaban keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan RAN PE dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan regulasi perundangan yang berlaku.

Pertemuan merekomendasikan perlunya koordinasi yang lebih intensif antara BNPT, Kemendagri, Kemenkeu, BPK dan juga Bappenas dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan RAN PE di daerah.

Adapun tindak lanjut serta saran dari kegiatan ini yaitu Kemendagri akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BNPT dan K/L terkait mengenai pelaksanaan RAN PE di daerah.

SOSIALISASI RAN PE SERTA PENYIAPAN RAD PE DI PROVINSI ACEH



Kegiatan diselenggarakan oleh AMAN Indonesia, UN Women, dan Balai Syura Ureung Inong Aceh bekerjasama dengan Kesbangpol Aceh, FKPT Aceh dan Pusat Riset HAM (PUSHAM) Universitas Syiah Kuala pada Tanggal 21 Januari 2022 bertempat di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh. Kegiatan bertujuan untuk melakukan sosialisasi tentang RAN PE dan membuka ruang pertukaran informasi tentang perkembangan daerah dalam implementasi RAN PE; membangun komitmen organisasi masyarakat sipil, akademisi bersama Pemda Aceh untuk mendorong implementasi RAN PE di Aceh, termasuk memastikan pengarusutamaan gender menjadi elemen yang dapat diimplementasikan di daerah; serta mengakomodasi masukan ide dan usulan terhadap rancangan RAD tentang upaya pencegahan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Kegiatan dibuka oleh Ketua Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh dan dihadiri oleh 23 Kesbangpol Kabupaten/Kota di Aceh, FKPT Propinsi NAD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Kemenag, akademisi dan perwakilan organisasi masyarakat sipil di Aceh. BNPT

yang diwakili oleh Dir. RM pada kesempatan tersebut mensosialisasikan mengenai RAN PE, pentingnya peran dan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan RAN PE, serta apresiasi terhadap berbagai inisiatif (*best practices*) yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Hal-hal yang menjadi catatan kegiatan:

- Masyarakat Aceh menyambut baik disahkannya Perpres 7/2021 tentang RAN PE dan menyampaikan harapan bahwa Aceh dapat berkontribusi pelaksanaan RAN PE di daerah.
- Untuk implementasi RAN PE di Aceh diperlukan langkah-langkah yang efektif untuk memastikan keterlibatan semua pihak, menyinergikan RAN PE dengan inisiatif yang telah dilaksanakan di daerah termasuk regulasi yang telah ada, serta mempertimbangkan kondisi kekhasan dan karakteristik yang ada di Aceh, antara lain pengalaman akan konflik sosial yang panjang, kondisi sosial budaya paska konflik, kondisi ekonomi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Aceh.

ROUNDTABLE DISCUSSION RAN PE "KEMANDIRIAN SOSIAL DAN EKONOMI KLIEN DALAM PROGRAM DERADIKALISASI, REHABILITASI DAN REINTEGRASI"



USAID



Yayasan Prasasti Perdamaian
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL
PEACE BUILDING **BRIDGING WITHOUT PREJUDICE!**



Kegiatan *virtual meeting* ini diselenggarakan oleh USAID Harmoni dengan menghadirkan pembicara antara lain: Direktur Deradikalisasi BNPT; Direktur Bimkemas dan Pengentasan Anak, Ditjenpas; Direktur *Center for Detention Studies* (CDS); dan Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian.

Kegiatan yang dilakukan pada Tanggal 25 Januari 2022 ini dibuka oleh Direktur RM, mewakili Deputi III BNPT dan dihadiri perwakilan K/L terkait, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Kegiatan bertujuan untuk mendiskusikan pembelajaran, praktik baik, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan deradikalisasi, termasuk peran serta masyarakat dalam deradikalisasi merujuk pada RAN PE. Hal-hal yang menjadi catatan dalam kegiatan:

1. Kondisi sosial ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan keluarga napiter/mantan napiter,

sehingga upaya pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap mereka merupakan hal penting.

2. Pendampingan & pembinaan didasarkan pada hasil *assessment* yang teliti yang dilakukan oleh PK Bapas berkoordinasi dengan pelaksana deradikalisasi lainnya termasuk pemangku kepentingan di daerah. dalam hal ini pengembangan kapasitas diperlukan dalam melakukan pendampingan & pembinaan.

3. Kegiatan diharapkan dapat mendukung implementasi RAN PE khususnya terkait dengan fokus deradikalisasi, melalui upaya mendorong pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi individual bagi klien deradikalisasi dalam rangka meningkatkan ketahanan individu dengan mengurangi faktor-faktor kerentanan yang dapat menjadi pendorong terjadinya terorisme.





www.bnpt.go.id

